

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 29 Maret 2022



BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media online dan media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Timesindonesia.co.id	Selasa, 29 Maret 2022	Konstruksi Bendungan Ciawi Selesai 2022, Menteri PUPR: Tingkatkan Kapasitas Pengendalian Banjir Jakarta	<p>Selain Bendungan Sukamahi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) juga membangun Bendungan Kering Ciawi (Bendungan Ciawi) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) dari hulu hingga hilir untuk mengurangi kerentanan bencana banjir kawasan Metropolitan Jakarta.</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/403178/kendalikan-banjir-jakarta-kementerian-pupr-ri-bendungan-ciawi-selesai-2022</p> <p>https://independensi.com/2022/03/28/konstruksi-bendungan-ciawi-selesai-2022-menteri-pupr-tingkatkan-kapasitas-pengendalian-banjir-jakarta/</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220329/45/1516186/tanggulangi-banjir-jakarta-konstruksi-bendungan-ciawi-selesai-2022</p> <p>https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/29/053000921/tuntas-2022-bendungan-ciawi-diyakini-mampu-kendalikan-banjir-jakarta-</p> <p>https://www.industry.co.id/read/104570/tingkatkan-kapasitas-pengendalian-banjir-jakarta-konstruksi-bendungan-ciawi-selesai-2022</p> <p>https://mitrapol.com/2022/03/28/konstruksi-bendungan-ciawi-selesai-2022-menteri-pupr-tingkatkan-kapasitas-pengendalian-banjir-jakarta/</p>
2	Independensi.com	Selasa, 29 Maret 2022	Tingkatkan Pemenuhan Kebutuhan Hunian, Kementerian PUPR Rampungkan Tujuh Rusun di Sumatera Utara	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan hunian layak bagi masyarakat, salah satunya melalui pembangunan rumah susun (Rusun), tercatat pada TA 2021 Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 196 tower rumah susun yang terdiri dari 7.075 unit.</p> <p>https://independensi.com/2022/03/28/tingkatkan-pemenuhan-kebutuhan-hunian-kementerian-pupr-rampungkan-tujuh-rusun-di-sumatera-utara/</p> <p>https://www.timesindonesia.co.id/read/news/403180/kementerian-pupr-ri-rampungkan-tujuh-rusun-di-sumatera-utara</p>

3	Kompas.com	Selasa, 29 Maret 2022	Tingkatkan Sanitasi, Kementerian PUPR Bangun Sarana Prasarana di LPK	<p>Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan program penyediaan sarana dan prasarana sanitasi di Lembaga Pendidikan Keagamaan (LPK) Sebagai informasi, program tersebut merupakan perpanjangan dari program infrastruktur air limbah domestik untuk menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) di lingkungan beraktivitas masyarakat, seperti di pondok pesantren (ponpes) dan LPK.</p> <p>https://biz.kompas.com/read/2022/03/28/163000228/tingkatkan-sanitasi-kementerian-pupr-bangun-sarana-prasarana-di-lpk.</p>
4	Bisnis.com	Sabtu, 26 Maret 2022	Kemen PUPR: Perbaikan dan Rekonstruksi Jalan Tol Selesai H-15 Lebaran	<p>Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan dalam mendukung pelaksanaan kelancaran arus mudik Lebaran 2022 yaitu fokus terhadap peningkatan pelayanan di Jalan Tol dengan memastikan kualitas Jalan Tol dengan kondisi baik, peningkatan layanan transaksi, peningkatan layanan tempat istirahat dengan protokol kesehatan Covid-19.</p> <p>https://ekonomi.bisnis.com/read/20220327/45/1515650/kemen-pupr-perbaikan-dan-rekonstruksi-jalan-tol-selesai-h-15-lebaran.</p>

Judul	Seluruh Konstruksi Bendungan Ciawi Selesai Tahun Ini	Tanggal	29 Maret 2022
Media	Investor Daily Halaman 7		
Resume	Selain Bendungan Sukamahi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR RI) juga membangun Bendungan Kering Ciawi (Bendungan Ciawi) di Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebagai bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (flood control) dari hulu hingga hilir untuk mengurangi kerentanan bencana banjir kawasan Metropolitan Jakarta.		

Seluruh Konstruksi Bendungan Ciawi Selesai Tahun Ini

JAKARTA-Seluruh pekerjaan konstruksi Bendungan Kering (Dry Dam) Ciawi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ditargetkan selesai pada tahun ini. Konstruksi Bendungan Ciawi mulai dilaksanakan secara bertahap (MYC) sejak Desember 2016 dengan progres fisik selesai 100% pada 2021. Bendungan Ciawi memiliki volume tampung 6.05 juta m³ dan luas genangan 39.40 hektare (ha) dengan biaya pembangunan sebesar Rp 798,7 miliar.

"Pada tahun anggaran 2021 (SYC) dilakukan pekerjaan lanjutan dengan nilai kontrak Rp 239,8 miliar untuk menyelesaikan pekerjaan akhir pada bangunan bendungan dan fasilitas umum dengan progres fisik dan keuangan selesai 100%. Saat ini tengah dilakukan pekerjaan lanjutan II berupa timbunan dengan progres hingga 16 Februari 2022 mencapai 80,2%. Ditargetkan seluruh pekerjaan konstruksi selesai tahun 2022," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono dalam pernyataan resminya di Jakarta, Senin (28/3).

Selain itu, Kementerian PUPR terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait dan berupaya keras untuk mempercepat pembebasan lahan, sehingga penyelesaian Bendungan Ciawi selesai sesuai target. Berdasarkan data progres pengadaan lahan sudah mencapai 98,83% dengan target penyelesaian uang ganti rugi (UGR) pada April 2022.

Pengadaan lahan bendungan dilakukan dengan skema dana talangan, yakni kontraktor membiayai terlebih dulu dan nantinya dibayarkan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN). Kontrak pekerjaan Bendungan Ciawi ditandatangani pada 23 November 2016 dengan kontraktor pelaksana PT Brantas Abipraya dan PT Sacna.

Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 m³ per detik.

Kementerian PUPR membangun Bendungan Kering Ciawi dan Bendungan Sukamahi sebagai bagian dari rencana induk sistem pengendalian banjir (*flood control*) dari hulu hingga hilir untuk mengurangi kerentanan bencana banjir kawasan Metropolitan Jakarta.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, sebagai bendungan kering maka pengoperasian Bendungan Ciawi akan berbeda dengan bendungan lain, yakni kedua bendungan ini baru akan digenangi air pada musim hujan. Sementara pada musim kemarau, bendungan ini kering. Baik Bendungan Ciawi maupun Sukamahi merupakan yang pertama kalinya dibangun di Indonesia. Kedua bendungan ini dibangun bukan untuk keperluan irigasi atau air baku, namun untuk meningkatkan kapasitas pengendalian banjir. (tm)

Judul	PUPR Jaring Masukan Bantuan Pembangunan Perumahan	Tanggal	29 Maret 2022
Media	Investor Daily Halaman 11		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menggelar kegiatan Konsultasi Publik guna membahas Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan.		

PUPR Jaring Masukan Bantuan Pembangunan Perumahan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menggelar kegiatan Konsultasi Publik guna membahas Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan.

Lewat Konsultasi Publik tersebut diharapkan dapat menjangkau ide, pemikiran, pandangan, dan masukan pembangunan dari berbagai pihak dalam rangka penyusunan Rapermen tentang perumahan di Indonesia.

“Kegiatan Konsultasi Publik ini sangat penting diselenggarakan untuk melakukan penjangkauan ide, pemikiran, pandangan dan masukan pembangunan dari berbagai pihak dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan,” ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto dalam publikasinya, pekan lalu.

Iwan menjelaskan, Rapermen Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan ini merupakan salah satu Rancangan Peraturan yang masuk di Proleg Kementrian PUPR Tahun 2022. Adapun

konsep dari Rapermen Bantuan Pembangunan Perumahan ini terdiri atas empat hal penting.

Pertama, Rapermen ini menyatukan empat substansi Bantuan Pembangunan Perumahan ke dalam satu Rapermen. Kedua, mencabut lima Peraturan Menteri PUPR yang berlaku sebelumnya. Ketiga, mengatur substansi umum tentang bantuan perumahan pada masing – masing direktorat teknis dan ke empat terkait dengan hal – hal yang bersifat teknis akan diatur secara detail dalam petunjuk teknis (Juknis) yang berbentuk Surat Edaran Direktur Jenderal Perumahan.

“Kami juga memberikan ruang bagi para pemangku kepentingan bidang perumahan agar terlibat dalam proses perumusan kebijakan tentang perumahan. Dengan demikian Kementerian PUPR dapat menghasilkan suatu kebijakan yang harmonis dan dapat dilaksanakan dengan baik dalam rangka mewujudkan pembangunan rumah layak huni bagi masyarakat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” katanya.

Adapun substansi bantuan perumahan pada Rapermen ini dibahas berdasarkan pada

perkembangan kebutuhan pengaturan di lapangan yang disesuaikan dengan arahan kebijakan Menteri PUPR dan atau Presiden, mengikutsertakan Balai Penyediaan Perumahan dalam mekanisme verifikasi bantuannya.

Selain itu, pemerintah pusat merupakan *enabler* bagi pemerintah daerah (pemda) dalam setiap pelaksanaan program bantuan perumahan yang dilaksanakan di wilayahnya. Rapermen ini juga membahas perkembangan teknologi berupa penggunaan Sistem Informasi Bantuan Perumahan (SIBARU) yang akan menjadi kanal pusat permohonan bantuan perumahan.

Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR telah melaksanakan kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pelaksanaan Bantuan Perumahan sebanyak tiga kali secara daring. Pelaksanaan Konsultasi Publik I untuk wilayah Sumatera dan Jawa pada 25 Februari 2022 dan Konsultasi Publik II pada 4 Maret 2022 untuk wilayah Kalimantan, Bali, NTB, dan NTT. Sedangkan pelaksanaan Konsultasi Publik III untuk wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua dilaksanakan pada 16 Maret 2022. (ed)